

SKRIPSI

**GUGATAN *ACTIO PAULIANA* TERHADAP HARTA
PERKAWINAN YANG DIPEROLEH SETELAH PAILIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 211K/PDT.SUS-PAILIT/2019)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HABIBIL MAHBUBI RIZWI

2010112169

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg: 34/PK-II/V/2024

**GUGATAN *ACTIO PAULIANA* TERHADAP HARTA
PERKAWINAN YANG DIPEROLEH SETELAH PAILIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 211K/PDT.SUS-PAILIT/2019)**

(Habibil Mahbubi Rizwi, 2010112169, Zahara, Zulkifli, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, ... halaman, 2024

ABSTRAK

Pengadilan Niaga sering kali digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik seperti tidak membayar utang atau membayar utang menurut keinginan debitur. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka sistem hukum kepailitan di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud mengenai tindakan hukum *Actio Pauliana*. *Actio pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Dalam kasus ini, Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* pada tingkat pertama dengan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg setelah Debitur pailit telah diputus dengan Putusan Nomor 07/Pailit/PN.Niaga.Smg. Namun, pada persidangan gugatan *actio pauliana* di tingkat pertama, hakim memutuskan menolak seluruh gugatan dari kurator. Sehingga, kurator tidak puas dan mengajukan permohonan pada tingkat kasasi yang telah mendapat putusan dengan Nomor 211 K/Pdt.Sus- Pailit/2019. Adapun rumusan dalam penelitian ini 1) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pada gugatan *Actio Pauliana* dalam putusan nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan kasasi Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang membatalkan putusan niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan serta sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus *actio pauliana* yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif 2) pertimbangan hakim juga mencatat adanya kekurangan bukti dari pihak penggugat (kurator) sehingga semua dalil-dalil gugatannya ditolak. Namun , pada di tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan di tingkat pertama dan mengabulkan permohonan pemohon.

Kata Kunci: Pailit, *Actio Pauliana*, Pengadilan Niaga